

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan bab pembuka dalam skripsi ini yang berisi penjelasan serta uraian dari beberapa sub-bab yakni latar belakang penelitian, rumusan masalah yang terdiri pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada skripsi ini, tujuan penelitian yang menguraikan tujuan-tujuan dari dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian yang berisi uraian-uraian manfaat dari penelitian ini, dan juga struktur organisasi skripsi yang terdiri dari lima bab.

1.1.Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, hampir seluruh negara di dunia mempraktikkan sistem politik yang mengacu kepada demokrasi karena hal tersebut merupakan simbol dari peradaban modern. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang didalamnya mengutamakan peran serta rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara sangat dilindungi dan dijaga. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil, politik, dan kebebasan rakyat harus dihormati dan dijunjung tinggi. Inti dari penegakan hak-hak sipil dan hak politik adalah melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Harus ada sebuah aturan untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang negara sebagai akibat dari campur tangan negara yang sangat luas (Hasan & Sari, 2005. hlm. 95).

Kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam suatu negara seringkali merugikan warga negara nya sendiri, bahkan cenderung membatasi hak-hak sipil dan kebebasan individu yang seharusnya dapat diberikan kepada seluruh masyarakat. Pembatasan-pembatasan ketat yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah dan militer kepada warga negara nya dapat mengakibatkan rusaknya kebebasan individu (Rosana, 2016. hlm. 38). Padahal pada dasarnya, kebebasan baik individu maupun kelompok merupakan hal yang seharusnya diberikan oleh negara. Hal tersebut akan berdampak pada stabilitas sosial maupun politik dalam negeri. Masyarakat akan melakukan gerakan-gerakan untuk berusaha lepas dari kekuasaan sebelumnya dan melakukan perubahan untuk

memulai kehidupan yang lebih baik. Gerakan yang dilakukan oleh rakyat, baik gerakan rakyat yang bersifat kedaerahan maupun gerakan rakyat yang bersifat nasional akan secara langsung mempengaruhi kondisi negara dan muncul suatu perubahan. Dalam hal ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan secara cepat atau yang disebut dengan revolusi. Oleh karena itu, perubahan tersebut bukan hanya perubahan birokrasi, juga muncul perubahan yang mempengaruhi pola pikir dan pola hidup masyarakat.

Umumnya, gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara dapat disebabkan oleh masyarakat yang sudah jenuh dengan pemerintahan yang berkuasa secara otoriter. Kawasan Asia Tenggara yang merupakan kawasan dengan negara-negara yang mayoritas baru saja merdeka pada pertengahan abad-20 juga tidak luput dari pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa secara otoriter. Latar belakang sejarah menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam perjalanan demokrasi di Asia Tenggara. Politik kolonialisme bangsa barat di Asia Tenggara serta dominasi negara-negara besar pasca Perang Dunia II sangat mempengaruhi proses demokratisasi negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, jelas faktor politik internasional sangat mempengaruhi konstelasi politik kawasan termasuk di Asia Tenggara dalam konteks isu-isu demokrasi (Maksum, 2018, hlm. 25). Sesaat setelah kemerdekaan, negara-negara di Asia Tenggara sebenarnya mengalami fase pemerintahan yang demokratis namun hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Menurut Nordholt (2014, hlm. 115) yang menyatakan bahwa:

Kemunduran demokrasi di Asia Tenggara berbarengan dengan kemunculan Perang Dingin di Asia Tenggara. Kawasan ini berubah menjadi arena peperangan terbesar dari Perang Dingin, yang kemudian termanifestasikan dalam perang yang panas dan berdarah antara Amerika, Uni Soviet, dan RRT, yang berupaya untuk memperluas dan menjaga pengaruh mereka dalam perpolitikan dunia.

Meletusnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia II juga mengakibatkan pemikiran-pemikiran politik di Asia Tenggara menjadi berubah menuju arah yang lebih fundamental. Negara-negara di Asia Tenggara yang pada awalnya merupakan negara demokratis namun lemah, berganti menjadi negara dengan rezim pemerintahan otoriter yang lebih kuat dengan masuknya militer ke dalam

pemerintahan pada tahun setelah 1950an. Penggabungan berbagai bentuk kekerasan politik telah merubah represi politik menjadi milisi sipil. Intimidasi kekerasan tetap menjadi bagian dari sistem politik (Nordholt, 2014. hlm. 118). Sebagai gambaran, Indonesia pasca pemerintahan Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno mengalami transisi menuju pemerintahan yang militeristik di bawah rezim Soeharto setelah berkembangnya isu komunis. Walaupun pada masa pemerintahan Soekarno, militer juga menjadi kekuatan yang mendominasi dalam ranah politik. Crouch (2007, hlm. 344) menyatakan bahwa kekuatan dominan Soeharto dalam politik Indonesia didapatkan dari dorongan terhadap PKI pada tahun 1965 dan keberhasilannya untuk menyingkirkan Soekarno. Dominasi militer dalam ranah politik masa rezim Orde Baru Presiden Soeharto ini semakin diperkuat dengan adanya konsep Dwifungsi yang menjadikan militer memiliki fungsi militer dan fungsi sosial-politik.

Sikap seorang pemimpin yang memerintah suatu negara dengan sistem yang otoriter akan menyebabkan kekecewaan pada masyarakat. Hal tersebut dapat memicu lahirnya suatu gerakan revolusi. Gejolak revolusi yang dilakukan oleh rakyat untuk melepaskan diri dari rezim pemerintahan yang dianggap tidak demokratis juga terjadi di Filipina pada tahun 1986. Filipina merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang pada masa kolonialisme bangsa barat. Kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1521 menandai awal kekuasaan Spanyol di Filipina. Kekuasaan Spanyol di Filipina bertahan sampai tahun-tahun berikutnya dan dalam dua ratus tahun pertama, Spanyol mengklaim kepemilikan resmi atas seluruh kepulauan (Abinales & Amoroso, 2005, hlm. 68). Akhir abad ke 19 menjadi babak baru bagi negeri Filipina. Setelah berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol, Filipina memasuki era penjajahan Amerika Serikat sejak tahun 1898 dan menjadi persemakmuran (*commonwealth*) Amerika Serikat pada tahun 1935 hingga akhirnya Filipina merdeka pada tahun 1946.

Revolusi yang terjadi di Filipina pada tahun 1986 berjalan secara damai dan tanpa kekerasan, berbeda dengan revolusi-revolusi yang umumnya terjadi di berbagai negara pada periode sebelumnya. Penggunaan metode “damai” atau “non-kekerasan”

dalam revolusi ini bukan tanpa alasan. Masyarakat Filipina yang mayoritas beragama Katolik serta kehadiran Gereja Katolik yang menjadi lembaga paling kuat dalam mengorganisasikan massa sangat berpengaruh dalam menentukan arah revolusi. Maka dari itu, revolusi EDSA sering juga dijuluki sebagai Revolusi Suci. Perlawanan tanpa kekerasan yang aktif di Filipina dianggap sebagai bentuk dari kata kasih yang merupakan inti ajaran Katolik (Nadeak & Atmadji, 1986. hlm. 126). Kampanye tanpa kekerasan tersebut terus digaungkan oleh gereja terutama oleh Uskup Agung Manila Kardinal Sin sebagai dasar untuk melawan pemerintah yang dianggap sudah keluar dari ketentuan moral negara. Di sisi lain, metode non kekerasan dalam perlawanan terhadap Ferdinand Marcos merupakan sebuah strategi untuk menjaga moral dan kepercayaan politik, serta menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konteks “damai” atau “non-kekerasan” ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam mengkaji peristiwa Revolusi EDSA di Filipina. Revolusi ini merupakan bentuk reaksi dari rakyat Filipina serta pihak oposisi pemerintahan terhadap rezim Ferdinand Marcos, yang telah berkuasa selama 20 tahun sejak pertama kali terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 1965. Di periode kedua nya, Ferdinand Marcos mengeluarkan Undang-undang Darurat Militer (*Martial Law*) tahun 1972 yang sangat merugikan masyarakat Filipina. Sejak saat itu Filipina memasuki periode suram akibat pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, penangkapan, dan pembunuhan (Seagrave, 1996, hlm. 306).

Demokrasi di Filipina pasca pemberlakuan Undang-Undang Darurat Militer terlihat hanya sebagai simbol saja. Walaupun tetap mengadakan beberapa kali Pemilihan Umum, baik pemilihan tingkat lokal maupun pemilihan Presiden, namun jabatan-jabatan yang terpilih selalu di dominasi oleh keluarga Marcos, militer, dan golongan Pro-Marcos. Sikap Marcos dalam memimpin Filipina cenderung otoriter. Seperti yang dikemukakan oleh Maksum (2018, hlm. 24) bahwa di era Marcos, demokrasi di Filipina mengalami tekanan besar. Rakyat ditekan habis-habisan dan dibatasi hak politiknya termasuk kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul. Marcos bahkan menyingkirkan beberapa tokoh oposisi yang ia anggap bisa mengancam pemerintahannya. Selain itu, keluarga Marcos juga hidup dalam kemewahan di tengah kemiskinan yang menghimpit sebagian besar rakyat Filipina.

Sikap tersebut tentunya sangat jauh dari nilai-nilai demokrasi yang harusnya berpihak kepada rakyat.

Pada tahun 1983, mantan Senator Filipina yang juga merupakan lawan politik dari Ferdinand Marcos yaitu Benigno “Ninoy” Aquino terbunuh di Bandara Internasional Manila setelah pulang dari pengasingannya di Amerika Serikat. Sejak lama, Ninoy dikenal sebagai seseorang yang memiliki banyak pengalaman didalam dunia politik bersama partai politiknya yang menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Sebagai seorang oposisi, ia juga aktif dalam memprotes bahkan menentang kebijakan pemerintahan Marcos. Oleh karena itu, maka tidak heran peristiwa terbunuhnya Benigno Aquino menjadi sebuah pukulan untuk masyarakat Filipina dan pihak oposisi karena kehilangan pemimpin yang menginspirasi dan dapat menyatukan beberapa kelompok oposisi. Namun disisi lain, kematian Benigno Aquino menjadi titik awal terjadinya gerakan-gerakan yang lebih masif dengan tujuan untuk menuntut Ferdinand Marcos mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Gerakan tersebut bahkan mulai terjadi saat prosesi pemakaman Benigno Aquino, dimana terdapat jutaan rakyat Filipina yang turun ke jalan mengiringi proses pemakaman. Selain sebagai perwujudan rasa hormat pada sosok Ninoy, gelombang protes juga merupakan simbol massa yang mulai berontak dari sikap diam dan rasa takut, sebuah keberanian kolektif yang tak pelak lagi merupakan latar belakang dari terbentuknya perjuangan kekuatan rakyat (Soetomo, 1998, hlm. 34).

Perjuangan tersebut tentunya harus dibarengi dengan taktik dan cara yang dinilai efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Nadeak & Atmadji (1986, hlm, 71) menyatakan bahwa perjuangan meruntuhkan rezim diktator Marcos dalam kenyataannya selama ini dilakukan menjadi dua saluran yang paling menonjol: melalui proses lembaga demokrasi (pemilihan), dan dengan tekanan-tekanan demonstrasi. Pada saluran perjuangan yang pertama, gerakan dilakukan oleh partai-partai politik kelompok oposisi. Sedangkan pada saluran perjuangan yang kedua, gerakan dilakukan oleh rakyat dari berbagai lapisan seperti kelompok mahasiswa dan kelompok buruh. Pada kasus Revolusi EDSA tahun 1986, masyarakat secara masif melakukan aksi “parlemen jalanan” dengan berbagai cara yang diikuti oleh beberapa kelompok

masyarakat dari golongan buruh, mahasiswa, masyarakat kelas menengah, bahkan pengusaha. Gerakan ini memberikan perlawanan nyata terhadap rezim Ferdinand Marcos hingga puncaknya pada Revolusi 1986. Meskipun, menurut Lane (1990, hlm. 5), gerakan tersebut menghasilkan banyak dukungan spontan dan tidak terorganisir, walaupun tidak sepenuhnya. Ini menyatukan berbagai organisasi yang ada serta melahirkan yang baru. Artinya, terdapat gerakan kolektif masyarakat yang dilatarbelakangi oleh tujuan yang sama dan gerakan tersebut menginspirasi individu ataupun kelompok lain untuk ikut tergerak. Berbagai organisasi sektoral maupun organisasi koalisi berdiri dengan latar belakangnya masing-masing. Tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan ini adalah Agapito 'Butz' Aquino, adik dari Benigno 'Ninoy' Aquino. Ia banyak memprakarsai berbagai gerakan massa dan demonstrasi untuk menumbangkan Marcos. Organisasi ATOM (*August Twenty One Movement*) dan BANDILA (*Bansang Nagkaisa sa Diwa at Layunin*) diprakarsainya masing-masing tahun 1983 dan 1985. Butz Aquino segera muncul sebagai tokoh Sosial Demokrat yang paling populer (Lane, 1990. hlm. 6).

Peristiwa pembunuhan Ninoy Aquino tahun 1983 mengakibatkan bangkitnya perlawanan masyarakat Filipina dan juga oposisi untuk dapat menumbangkan Ferdinand Marcos, yang puncaknya terjadi pada tahun 1986. Saluran perlawanan yang mulai bangkit kembali pada periode tersebut adalah media massa. Media massa sangat penting peranannya bagi mobilisasi kekuatan rakyat (Bresnan, 1988. hlm. 249). Pada masa-masa diberlakukannya Undang-Undang Darurat Militer, kendali atas stasiun televisi, surat kabat, dan radio berada dibawah monopoli pemerintah. Hingga pada saat setelah tahun 1983, mulai bermunculan penerbitan baru dari beberapa media massa. Terkhusus untuk Gereja Katolik, diberikan hak untuk mendirikan stasiun radio. Hal tersebut menarik peneliti untuk mengkaji bagaimana media massa dapat berperan dalam mobilisasi kekuatan rakyat meskipun masih berada dalam bayang-bayang rezim Marcos. Dalam Soetomo (1998. hlm. 35) menyatakan bahwa aksi massa sesaat setelah pemakaman Ninoy Aquino beriringan dengan lahirnya media alternatif yang mulai berani mengungkapkan secara jujur kenyataan-kenyataan yang sedang berlangsung.

Selain itu juga, Gereja Katolik sebagai lembaga agama mayoritas di Filipina, ikut dalam memainkan peran politik saat Filipina sedang mengalami krisis. Gereja telah bertindak di luar tradisinya, terdorong untuk secara aktif memainkan peranan politik yang berubah coraknya (Bresnan, 1988, hlm. 162). Kardinal Jaime Sin, merupakan tokoh sentral bagi Gereja dalam melakukan gerakan-gerakan menuntut keadilan dan menentang kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Marcos. Gejolak revolusi yang datang dari berbagai pihak tersebut disebabkan oleh adanya keinginan rakyat Filipina yang menghendaki kembalinya demokrasi, agar dapat berkumpul dan mengekspresikan pendapat secara bebas, serta mendapat keadilan yang selama lebih dari satu dekade terkekang oleh sistem otoriter pemerintah Filipina. Kondisi semacam ini juga semakin diperparah oleh adanya krisis ekonomi yang melanda Filipina sejak lama. Seperti yang diungkapkan oleh Nadeak & Atmadji (1986, hlm. 162) bahwa Filipina memiliki beban hutang sebesar 25 milyar dolar AS, pengangguran yang meningkat dari 15-40%, dan tingkat inflasi yang melangit.

Setelah berlangsungnya revolusi dalam suatu negara, pemerintahan yang baru mulai melakukan penataan ulang dalam berbagai aspek yang diharapkan dapat lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Roskin dkk (2016, hlm. 342) bahwa revolusi didasarkan pada keyakinan bahwa rezim pemerintahan yang baru dapat berkomitmen memperbaiki masyarakat yang menjadikannya adil dan makmur. Begitupun dengan Filipina, melalui sebuah revolusi yang berlangsung secara damai dan tanpa kontak senjata pada tahun 1986, menjadikan Corazon Aquino dan Salvador Laurel sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk Filipina. Corazon Aquino merupakan istri dari mantan Senator Benigno Aquino. Meskipun menjadi istri dari mantan senator dan juga tokoh oposisi pemerintahan Ferdinand Marcos, Corazon Aquino sendiri tidak memiliki pengalaman dalam dunia politik baik melalui pendidikan formal maupun terjun langsung sebagai politikus. Pengetahuannya tentang politik hanya ia dapatkan melalui Benigno Aquino dan keluarga besar nya, keluarga Cojuangco dan keluarga Sumulong, yang merupakan dua keluarga yang telah lama berkarir dalam perpolitikan Filipina. Satu-satunya alasan yang melatarbelakangi dipilih nya Corazon Aquino menjadi calon presiden adalah kepercayaan publik bahwa Cory

dapat menyatukan berbagai kekuatan oposisi dan dia dianggap sebagai pengganti Benigno Aquino (Crisostomo, 1986. hlm.141). Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Corazon Aquino ini mengupayakan berbagai perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk politik dan sosial.

Melihat dari pernyataan diatas, maka topik penelitian mengenai peristiwa Revolusi EDSA di Filipina ini menarik untuk diteliti lebih dalam. Tentu ada alasan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. *Pertama*, peristiwa Revolusi EDSA pada tahun 1986 berjalan dengan damai sehingga sangat menarik untuk melihat apa saja faktor yang membuat suatu gerakan revolusi dengan tujuan menggulingkan rezim otoriter berlangsung dengan damai. *Kedua*, tentu saja hal yang menjadi daya tarik adalah kondisi setelah terjadinya revolusi terutama dalam periode pemerintahan presiden wanita Corazon Aquino.

Berawal dari ketertarikan tersebut, maka kajian lebih mendalam terkait peristiwa tersebut akan disusun dalam penulisan skripsi dengan judul “*Epifanio De Los Santos Avenue (EDSA) Revolution: Perubahan Sosial Politik Filipina tahun 1983-1992*”. Dalam penelitian ini, terdapat batasan masalah dalam rentang periode tahun 1983 sampai tahun 1992. Seperti yang telah dijelaskan diatas, tahun 1983 menjadi tahun awal dalam penulisan skripsi ini karena pada tahun tersebut merupakan tahun terbunuhnya tokoh oposisi terkuat dan sangat disegani di Filipina yaitu Benigno “Ninoy” Aquino. Peristiwa tersebut menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan yang lebih masif dari masyarakat Filipina untuk menumbangkan rezim Ferdinand Marcos.

Sedangkan tahun 1992 menjadi batas akhir dari penulisan skripsi ini karena pada tahun tersebut merupakan akhir kepemimpinan Corazon Aquino, seorang wanita yang menjadi presiden Filipina setelah menumbangkan Ferdinand Marcos tahun 1986. Tahun ini juga dijadikan sebagai batas akhir karena untuk mengetahui apakah peristiwa Revolusi EDSA tahun 1986 sangat berpengaruh dan memberikan suatu perubahan bagi masyarakat serta pemerintahan Filipina, atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca bahwa peristiwa revolusi tidak selamanya dilakukan dengan cara kontak senjata, kekerasan, atau berperang.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat permasalahan pokok yang menjadi garis besar dalam penelitian ini yaitu “*Bagaimana Peristiwa Revolusi EDSA yang terjadi di Filipina tahun 1986 serta dampaknya bagi kehidupan sosial politik di Filipina hingga tahun 1992?*”. Untuk mengarahkan permasalahan yang dikaji agar lebih jelas dan fokus pada satu tema, maka dibuat pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial dan politik Filipina menjelang terjadinya Revolusi EDSA sebelum tahun 1983?
2. Bagaimana peranan gerakan “*Parliament of the Street*” dan Media Massa dalam Revolusi EDSA tahun 1983-1986?
3. Mengapa Revolusi EDSA yang terjadi di Filipina berjalan dengan damai?
4. Bagaimana dampak Revolusi EDSA terhadap kehidupan sosial dan politik Filipina tahun 1986-1992?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang terdiri dari dua aspek yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan terhadap penelitian sejarah Kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Sedangkan, tujuan khusus dalam penelitian ini merupakan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi sosial dan politik Filipina menjelang terjadinya Revolusi EDSA sebelum tahun 1983;
2. Mendeskripsikan peranan “*Parliament of the Streets*” dan Media Massa dalam Revolusi EDSA tahun 1983-1986;
3. Menganalisis proses terjadinya Revolusi EDSA di Filipina tahun 1986;
4. Mendeskripsikan dampak Revolusi EDSA terhadap perkembangan sosial dan politik Filipina dibawah pemerintahan Corazon Aquino tahun 1986-1992.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan sejarah sebagai penambah khasanah keilmuan sejarah terutama dalam Sejarah Kawasan Asia Tenggara;
 - b. Memperkaya kajian dalam penelitian sejarah Kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dunia II.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan, pemikiran, serta perbandingan dalam penulisan sejarah kawasan lainnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti;
 - b. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema serupa yaitu mengenai Revolusi EDSA di Filipina namun dengan sudut pandang yang berbeda.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disesuaikan dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia melalui Pedoman Karya Ilmiah yang diterbitkan tahun 2018. Adapun struktur organisasi skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini. Beberapa hal yang dijelaskan dalam bab ini diantaranya adalah latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Latar belakang penelitian menjelaskan tentang topik yang dipilih dalam penelitian dan alasan yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan topik tersebut. Selain itu, terdapat rumusan masalah yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan awal untuk kemudian dipecahkan dalam proses penelitian. Rumusan masalah juga berfungsi sebagai batasan masalah agar memudahkan dalam mengkaji permasalahan secara khusus untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dari topik dan fokus penelitian. Selanjutnya, dirumuskan juga tujuan dan manfaat dari penelitian untuk mengetahui sasaran serta harapan yang ingin dicapai dari

penulisan skripsi ini. Kemudian yang terakhir adalah struktur organisasi skripsi, yang menjelaskan secara ringkas mengenai isi dari masing-masing bab yang dituliskan dalam skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka, berisi pemaparan konsep-konsep yang relevan guna mendukung proses penulisan terhadap permasalahan yang dikaji tentang *Epifanio De Los Santos Avenue (EDSA) Revolution: Perubahan Sosial Politik Filipina tahun 1983-1992*. Selain itu, dalam kajian pustaka juga akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian yang diteliti. Penelitian terdahulu tersebut berupa artikel jurnal, skripsi, dan tesis. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai kerangka berfikir untuk menjelaskan hasil temuan di lapangan agar penulisan skripsi ini lebih struktur dan sistematis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai penjelasan dari metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian dimulai dari proses pencarian sumber-sumber dan data-data yang kemudian diolah serta dianalisis untuk dituliskan menjadi sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi. Metode yang digunakan yaitu metode historis atau metode sejarah yang terdiri dari beberapa langkah diantaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam bab ini juga ditentukan pendekatan dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan masalah.

Bab IV Pembahasan, bab ini merupakan isi dari pembahasan yang diangkat oleh mengenai “*Epifanio De Los Santos Avenue (EDSA) Revolution: Perubahan Sosial Politik Filipina tahun 1983-1992*”. Pembahasan dijelaskan secara menyeluruh agar dapat menjawab permasalahan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rumusan masalah.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, pada bab ini berisi mengenai hal-hal pokok yang telah dijelaskan terkait hasil temuan. Bisa dikatakan bab ini berisi mengenai konklusi atas jawaban dari setiap pertanyaan dalam rumusan masalah sesuai dengan interpretasi dan pemahaman atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi serta kontribusi untuk

beberapa pihak terkait mengenai “*Epifanio De Los Santos Avenue (EDSA) Revolution: Perubahan Sosial Politik Filipina tahun 1983-1992*”.